

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN

NO.	ASPEK	FOKUS	NO.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBUJAKAN TEKNIS PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 1. Program Pengembangan Agribisnis 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD : 1. Program Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD (2 program) / jumlah program Nasional (2) x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 2 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program x 100%	50%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Sebanyak 5 SOP terdiri dari : 1. SOP tentang Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan 2. SOP tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Produksi 3. SOP tentang Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 4. SOP tentang Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim Pengawasan Peredaran Benih, Pemeriksaan/Pengujian Benih Perkebunan, Pemeriksaan, Pengujian Bibit Perkebunan 5. SOP tentang Standar Pelayanan Publik Pendayagunaan Website Disbun 6. SOP tentang Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	5 (lima) SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis Data Pendukung : Fotocopy SK SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yg ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksana sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	Ada	Data Pendukung : Fotocopy Perda
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan Sesuai PERDA Prov. Kaltim No. 08 Tahun 2008	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (jumlah eselon yang terisi = 33 eselon	Jumlah jabatan yang ada (33) di bagi jumlah jabatan yang ada (33) x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 33 - jabatan yang harus ada, sebanyak 33	100%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5	Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	1. POPT Muda pada UPTD PBP 2. Fungsional PBT Pertama UPTD PBP 3. Fungsional Pranata Humas Madya 4. Fungsional Pengawas Benih Tanaman 5. Fungsional Pengendali OPT	Ada	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Jumlah PNS Provinsi 7235 orang	Jumlah PNS SKPD (117 orang)	- PNS SKPD, sebanyak 117 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 7235 orang	1.62%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 33 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 33 org	100%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 33 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 33 jbt	100%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada Dokumen yang ada tahun 2014, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Dokumen Renstra SKPD 2013-2018 2. Dokumen Renja 2014 3. Dokumen RKA-SKPD 2014 4. Dokumen DPA-SKPD 2014	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program Renja SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD (6 prog) yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dlm Renja SKPD, sebanyak 6 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	80%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2014 dan Renja SKPD ybs
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD	11	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD (6 program)	Jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2014 dan Renja SKPD ybs
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program Renja SKPD (5 prog) diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yg diakomodir dalam DPA SKPD di bagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program	100%	Mengacu dokumen RKA SKPD tahun 2014 dan dokumen DPA SKPD tahun 2014
		Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran SKPD, sebesar Rp 60,571,250,877.75 - Total belanja APBD, sebesar Rp. Rp 11,192,326,880,286.00	0.54%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Besaran Belanja Modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 2,780,092,500.00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 45,835,155,468.75	6.07%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar : Rp 1,165,440,000.00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar : Rp 38,753,920,125.00	3.01%	
			16	Total belanja pemeliharaan	Total belanja pemeliharaan di bagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar : Rp 1,165,440,000.00	2.54%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 45,835,155,468.75		
		Laporan Keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada Laporan keuangan sebanyak 3 jenis : 1. Laporan LRA 2. Laporan Neraca 3. Laporan Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Data Pendukung : Fotocopy LRA Data Pendukung : Fotocopy Neraca Data Pendukung : Fotocopy CALK
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada - Buku Inventaris Barang	Ada	Data Pendukung : Buku Inventaris Barang
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp - - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 45,355,135,931.00	0%	Data Pendukung : Nilai Aset Tetap di Neraca
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Media Masa	Jumlah fasilitas / prasaran partisipasi	Jenisnya : 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Pengumuman Media Masa 4. Leaflet 5. Layanan SMS	Ada Ada Ada Ada Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada Survey tentang kepuasan pengunjung website Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Ada	